



# **LAKIP**

**(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)**

# **2022**

## **BAPPEDA**

**(BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH)**

## **KOTA BAUBAU**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Baubau, Februari 2023

Pit. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BAUBAU,

**Dr. DAHRUL DAHLAN, S.STP., M.Si**  
Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19780717 199612 1 002



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Bappeda Kota Baubau .....	4
1.4. Aspek Strategis .....	14
1.5. Sumber Daya Dinas Bappeda Kota Baubau .....	18
1.6. Sarana Prasarana Dinas Bappeda Kota Baubau .....	21
1.7. Keuangan .....	23
1.8. Sistematika Penyajian .....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	27
2.1. Rencana Strategis .....	27
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 .....	41
2.3. Perjanjian Kinerja 2021 .....	41
2.4. Program dan Kegiatan .....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	51
3.1. Pengukuran Kinerja Dinas Bappeda Kota Baubau .....	51
3.2. Capaian Kinerja Organisasi.....	55
3.3. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	67
3.4. Realisasi Anggaran .....	72
BAB IV PENUTUP .....	83



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappeda Kota Baubau menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LAKIP Bappeda Kota Baubau Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kota Baubau bagi Wali Kota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2022.



## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2022 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau No. 1 Tahun 2021, tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Baubau Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023.



11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau;
12. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 60 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau.

### **1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BAUBAU**

#### **A. TUGAS POKOK**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Bappeda Kota Baubau merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Baubau dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah. Sebagai koordinator perencanaan sebagaimana tersirat dalam Pasal 150 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, Bappeda Kota Baubau merupakan penanggungjawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Dengan peran tersebut, maka untuk menjawab tantangan berbagai permasalahan pembangunan dan menghasilkan solusi yang tepat, Bappeda harus mampu melakukan perencanaan pembangunan daerah yang dapat memadukan antar sektor dan mensinergikan berbagai kepentingan regional baik dengan provinsi maupun dengan pusat. Dengan peranan tersebut, maka peranan Bappeda sebagai katalisator sekaligus dinamisator pembangunan Kota Baubau cukup strategis sehingga menuntut sumber daya manusia aparatur Bappeda untuk semakin profesional di bidang tugasnya serta peka terhadap dinamika pembangunan yang semakin kompleks untuk selanjutnya diformulasikan dalam bentuk kebijakan Wali Kota dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Baubau Tahun 2018-2023.

## B. FUNGSI

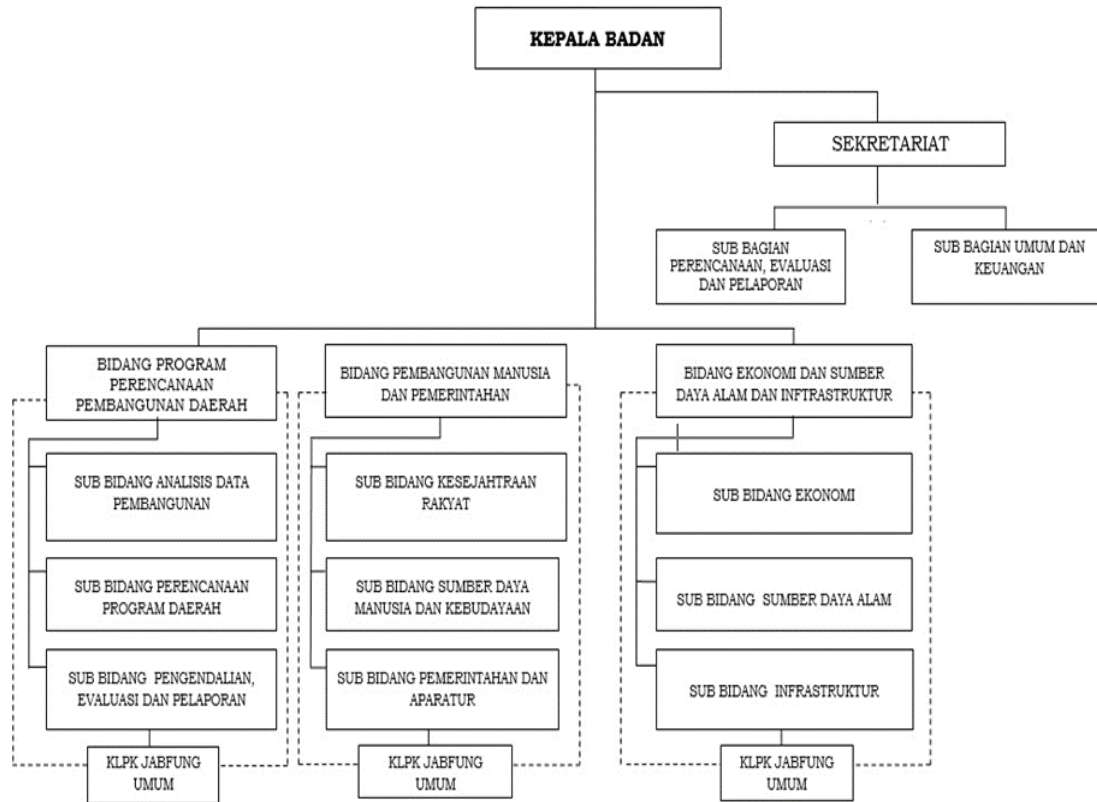
Menurut Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 60 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah. Pada sisi lain, dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau dapat di lihat sebagai berikut :

**Gambar 1.3.1**  
**Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau**





WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

## 1. Kepala Badan

Tugas Pokok :

Sesuai dengan peraturan wali kota Baubau nomor 60 tahun 2021 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta melaksanakan perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan mengsinergikan perencanaan, mengendalikan pembangunan daerah, memimpin, membina dan pengkoordinasian pelayanan administrasi, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan;

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;



- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Selain melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Penggordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Badan
- g. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara;



- h. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
- i. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Badan, serta kearsipan dan dokumentasi;
- j. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 sub bidang :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan, penyusunan program dan kegiatan bantuan dalam dan luar negeri, pengkoordinasian kegiatan perencanaan, serta pelaporan pelaksanaan program dilingkup Badan;

- b. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, penataan organisasi dan tata laksana, pengadaan dan layanan internal, pengelolaan kepegawaian, pengembangan sistem kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian, melaksanakan pelayanan keuangan, penyiapan penatausahaan perbendaharaan dan penyiapan pelaporan keuangan Badan.

- 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang analisis



data dan informasi pembangunan, perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

Selain melaksanakan melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan didaerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran didaerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. Pengelolaan analisa hasil evaluasi untuk pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;



m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;

Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan, melaksanakan analisa data dan pengumpulan data pembangunan serta desiminasi pembangunan daerah;

b. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;

(Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah melalui pendekatan holistik serta sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi, kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

c. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan kebijakan, koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. selain melaksanakan tugasnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :



- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga di provinsi dan kab/kota dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk



- teknik perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;  
Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan kebijakan, koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber daya manusia dan kebudayaan;
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.  
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat.
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan  
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;  
selain melaksanakan tugasnya, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;



- f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga di provinsi dan kab/kota dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Perekonomian;

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pengordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;

b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;

Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman petunjuk teknis dan melaksanakan pengordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya alam;

c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman petunjuk teknis dan melaksanakan pengordinasian,





perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Bappeda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.

#### 1.4 JJ ASPEK STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah didokumentasikan dalam Dokumen perencanaan pembangunan secara bertahap. Dokumen perencanaan tersebut terdiri atas RPJP, RPJM, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Setelah disusun dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, Dokumen perencanaan ini kemudian dilegalisasi melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Peraturan ini kemudian menjadi sarana publikasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah sehingga masyarakat dan pihak swasta mengetahuinya dan dapat berpartisipasi dalam implementasinya.

Secara spesifik untuk mengoptimalkan peran Bappeda dalam mencapai tujuan sasaran dalam RPJMD dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

**Tabel 1.4.1**  
**Identifikasi Permasalahan**  
**Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Baubau :**



Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Sumber Daya Manusia Perencana	SDM aparatur Bappeda tidak semuanya berasal disiplin ilmu atau mengerti tentang perencanaan	Kompetensi, keahlian dan Latar Belakang Pendidikan	Penempatan paratur tingkat staf masih menjadi kewenangan Bappeda	Penempatan aparatur tingkat eselon IV hingga eselon II menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian	Belum memadai nya kapasitas dan kualitas aparatur
Database	Terbatasnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	Data Berbasis Teknologi dan Informasi	Dukungan Kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan	-	Terbatasnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
Penyediaan Dokumen Perencanaan	Bappeda Kota Baubau telah melakukan penyusunan beberapa dokumen pembangunan, mulai dari dokumen perencanaan tahunan, lima tahunan maupun berbagai kajian pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan	Ketepatan Waktu Penyediaan dokumen Perencanaan, dan Kesesuaian muatan dokumen perencanaan dengan ketentuan perundang-undangan	Dukungan Kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan	dukungan dari Unit Kerja/SKPD dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kinerja program/kegiatan pembangunan telah dilakukan	Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan SKPD dan Bappeda  Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi untuk menjamin konsistensi antara



Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
	pembangunan				dokumen rencana pembangunan daerah, dan konsistensi antara rencana pembangunan nasional dan daerah
Pelaksanaan Musrenbang	Kualitas Musrenbang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat dan dapat diinventarisasi oleh Bappeda dalam dokumen perencanaan	Usulan musrenbang yang terakomodir dalam renja SKPD masih kurang optimal	Dukungan Kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan	Dukungan SKPD	Belum terkoordinasinya hasil pelaksanaan Musrenbang Kelurahan hingga tingkat kota
Sarana dan Prasarana Pendukung	Sarana dan prasarana pendukung yang ada belum optimal untuk menunjang kinerja aparatur Bappeda	Kenyamanan dalam bekerja	Dukungan Kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan	-	Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Bappeda

Untuk mengoptimalkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas Bappeda Kota Baubau melakukan identifikasi isu-isu strategis yang mejadi faktor penghambat dan faktor pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Bappeda Kota Baubau.

**Tabel 1.4.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Visi : Terwujudnya Kota Baubau yang Maju Sejahtera dan Berbudaya				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Mewujudkan Kota Baubau yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan				
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Belum optimalnya konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif	Kapasitas dan kualitas aparatur perencana yang belum memadai	Dukungan Pemerintah Pusat Provinsi maupun daerah melalui program dan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur perencana
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Belum memadainya ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurang optimalnya implementasi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan dalam pembangunan Kota Baubau	Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun daerah melalui program dan kebijakan pengembangan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Ekonomi



## 1.5 SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sumber Daya Manusia (SDM) perencana yang berkualitas merupakan pelopor dan penentu arah pembangunan daerah. Saat ini, SDM aparatur Bappeda tidak semuanya berasal disiplin ilmu atau mengerti tentang perencanaan. Sistem yang terbangun sekarang ini adalah siapapun bisa dimasukkan ke Bappeda meskipun orang-orang tersebut tidak mempunyai keahlian khusus atau spesialis serta mengerti tentang perencanaan. Padahal, sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mengkoordinasi semua perencanaan pembangunan dan penanaman modal di Kota Baubau, SDM Bappeda Kota Baubau idealnya berasal dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian yang berjiwa perencana sekaligus mempunyai jiwa wirausaha (entrepreneurships). Permasalahan ini semakin sulit, karena pejabat struktural dan/atau staf yang menangani Bidang Perencanaan Unit Kerja/SKPD tidak semuanya mempunyai keahlian perencanaan yang memadai.

Selain itu, sampai saat ini SDM aparatur Bappeda Kota Baubau dengan keahlian dalam bidang penelitian dan pengembangan masih terbatas, begitu pula dalam bidang pembangunan sosial dan budaya, Kelompok Jabatan Fungsional belum difungsikan. Oleh karena itu, ke depan upaya peningkatan kualitas SDM aparatur perencana menjadi sesuatu yang penting. Di samping itu, penempatan aparatur yang tetap sesuai keahlian juga menjadi pertimbangan-pertimbangan penting untuk mencapai aparatur yang handal.

**Tabel 1.5.1**  
**Komposisi dan Jumlah Pegawai**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau tahun 2022**

NO.	URAIAN	JUMLAH	PRESENTASE (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	40	74,07

2.	Magang/PTT	14	25,93
	<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>

Komposisi jabatan pegawai berdasarkan golongan ruang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, sampai dengan Tahun 2022 terdata sebagai berikut :

**Tabel 1.5.2**  
**Komposisi Jabatan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau tahun 2022**

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	3	3
4.	Kepala Seksi / Subbag	-	-	11	-	11
5.	Staf / Pelaksana	-	2	22	-	24
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>40</b>
	<b>% terhadap Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan</b>	-	<b>5%</b>	<b>82,50%</b>	<b>12,50%</b>	<b>100%</b>

Komposisi personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan lingkup Badan Perencanaan Daerah Kota Baubau sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.5.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau tahun 2022**



NO.	JABATAN	Eselon	TOTAL
1.	Kepala Dinas	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kepala Seksi / Subbag	IV.a	11
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>
<b>% terhadap Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan struktural</b>			<b>100%</b>

**Tabel 1.5.4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau tahun 2022**

NO	JABATAN	PENDIDIKAN FORMAL					JUMLAH	
		S3	S2	S1	D3	D2		SLTA
1.	Kepala Dinas		1				1	
2.	Sekretaris	1					1	
3.	Kepala Bidang		1	2			3	
4.	Kepala Seksi / Subbag		4	7			11	
5.	Staf / Pelaksana		1	20	1		2	24
6.	Magang / PTT			6	1		7	14
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>54</b>
<b>% terdapat Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan</b>		<b>1,85 %</b>	<b>12,96 %</b>	<b>64,82 %</b>	<b>3,41 %</b>	<b>-</b>	<b>16,67 %</b>	<b>100%</b>



## 1.6 SARANA PRASARANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BAUBAU

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai guna menunjang keberhasilan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sampai dengan tahun 2022 sarana prasarana dimaksud meliputi komponen :

1. Alat-alat angkutan;
2. Alat ukur;
3. Alat kantor dan rumah tangga;
4. Alat studio dan alat komunikasi;
5. Alat lainnya.

Dari penjelasan di atas, merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, cakupan ketersediaan sarana prasarana kerja ditujukan bagi sarana prasarana kerja pejabat lingkup Pemerintah Daerah, sehingga rasio ketersediaan sarana prasarana dengan jumlah personil secara keseluruhan memerlukan penambahan baik kualitas maupun kuantitas. Daftar tabel sarana dan prasarana :

**Tabel 1.6.1**  
**Sarana dan Prasarana Kerja**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2022**

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH	KEADAANBARANG INVENTARIS			KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7





<b>1</b>	<b>Furniture / Meubel</b>						
1	Meja Kerja Eselon II	1 Unit	1	-	-		
2	Meja Kerja Eselon III	4 Unit	4	-	-		
3	Meja Kerja Non Struktural ( Biro )	11 Unit	11	-	-		
4	Meja Kerja Non Struktural ( ½ Biro )	15 Unit	15				
4	Meja Rapat	10 Unit	10	-	-		
5	Meja Kerja bersekat	3 unit	3	-	-		
6	Kursi Kerja Eselon II	7 Unit	7	-	-		
7	Kursi Kerja Eselon III	2 Unit	2	-	-		
8	Kursi Kerja Non Struktural	2 Unit	2	-	-		
9	Kursi Besi	10 Unit	10	-	-		
10	Kursi Rapat ( Futura )	5 Unit	5	-	-		
11	Kursi Tamu	2 Unit	1	1	-		
12	Lemari Kayu	17 Unit	5	-	-		
13	Lemari alat	2 unit	2	-	-		
19	Lemari arsip geser	4 unit	8	-	-		
20	Filing Kabinet	6 unit	9	-	-		
21	Mobile file Manual	1 Unit	1				
<b>2</b>	<b>Elektronik</b>						
1	AC Split	19 Unit	15	2	2		
2	Komputer	15 Unit	10	2	3		
3	Laptop	30 Unit	20	5	5		
4	Printer	34 Unit	25	5	4		
7	Slide Projektor	10 Unit	10	-	-		
8	Kamera	6 Unit	6	-	-		
9	Server	2 Unit	2	-	-		
10	Scanner	6 Unit	6	-	-		
11	CCTV	1 Unit	2	-	-		
12	Mesin Absensi	1 Unit	-	-	1		



	13	UPS	9 Unit	9	-	-	
	14	Televisi	7 Unit	5	-	2	
	15	Kulkas	1 unit	1	-	-	
	16	Alat Pemadam Api	5 unit	1	-	-	
	17	Layar LCD	1 unit	1	-	-	
	18	Kulkas Mini / screen	1 unit	1	-	-	
	19	Dispesner	2 unit	1	-	-	
	20	Mix Confrence	21 unit	21	-	-	
	21	Vacum Cleaner	1 unit	1	-	-	
<b>3</b>		<b>Kendaraan Dinas</b>					
	1	Kendaraan Roda 4	3 Unit	3	-	-	
	2	Kendaraan Roda 2	22 Unit	3	-	2	

## 1.7 KEUANGAN

A. Berdasarkan DPA Induk sebelum Perubahan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 memperoleh pagu sebesar Rp. 8.234.947.336,00- (Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus tiga Puluh Enam Rupiah). Yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 7.641.307.336,00-

Terdiri dari :

a. Belanja Pegawai : Rp. 4.018.783.636,00-

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.622.523.700,00-

2. Belanja Modal Rp. 593.640.000,00-

terdiri dari :

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : RP. 24.140.000,00

b. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi : RP. 137.500.000,00

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 432.000.000,00-

B. Berdasarkan DPPA (DPA Perubahan) Badan Perencanaan Pembangunan



Daerah Kota Baubau Tahun 2022 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 10.178.339.800,00-, (Sepuluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus rupiah).

terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 8.910.383.800,00-

Terdiri dari :

a. Belanja Pegawai : Rp. 4.215.350.050,00-

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.695.033.750,00-

2. Belanja Modal Rp. 1.267.956.000,00-

terdiri dari :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : RP. 531.316.000,00-

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : RP. 24.140.000,00

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi : RP. 137.500.000,00

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 575.000.000,00-

Dari pagu anggaran sesudah perubahan tersebut **terrealisasi** yaitu sebesar Rp. 9.065.298.040,00,- yaitu terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 7.846.177.040,00-

Terdiri dari :

a. Belanja Pegawai : Rp. 3.413.706.409,00-

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.432.470.631,00-

2. Belanja Modal Rp. 1.219.121.000,00-

terdiri dari :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : RP. 487.772.000,00-

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : RP. 19.999.000,00-

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi : RP. 137.127.000,00-

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 574.223.000,00-

**Tabel 1.7.1**  
**Anggaran Perubahan dan Realisasi Per-Jenis Belanja**  
**Per Desember Tahun 2022**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau**

No	Jenis	Anggaran	Realisasi	%
1.	<b>Belanja Operasi :</b>	<b>8.910.383.800</b>	<b>7.846.177.040,00</b>	<b>88,06</b>
	a. Belanja Pegawai	4.215.350.050	3.413.706.409	80,98
	b. Belanja Barang dan jasa	4.695.033.750	4.432.470.631	94,41
2.	<b>Belanja Modal :</b>	<b>1.267.956.000</b>	<b>1.219.121.000</b>	<b>96,15</b>
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	531.316.000,00	487.772.000	91,80
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.140.000	19.999.000	82,85
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	137.500.000	137.127.000	99,73
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	575.000.000	574.223.000	99,86
	<b>Jumlah</b>	<b>10.178.339.800</b>	<b>9.065.298.040</b>	<b>89,06</b>

## 1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah ketidak berhasilan kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Baubau
- 1.4 Apek Strategis
- 1.5 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Baubau
- 1.6 Sarana Prasarana Dinas Bappeda Kota Baubau
- 1.7 Keuangan
- 1.8 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Tahun 2021
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2.4 Program Dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Bappeda Kota Baubau
- 3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2021

BAB IV. PENUTUP



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda diberikan kewenangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan Strategis Bappeda Kota Baubau tahun 2018-2023 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Baubau selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2018-2023, dengan rumusan visi jangka menengah, misi, tujuan, sasaran hingga arah kebijakan.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Baubau 2018-2023 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran perencanaan pembangunan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Di samping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.



RPJM Daerah Kota Baubau merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dengan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan RPJP Daerah.

Adapun RPJM Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Visi pembangunan jangka menengah Kota Baubau Tahun 2018-2023 adalah **“Mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya Tahun 2018-2023”**. Visi tersebut mengandung tiga elemen utama pembangunan yaitu mewujudkan Kota Baubau yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya yang menekankan pada pemerataan pembangunan demi kesejahteraan melalui kemajuan pembangunan yang berbudaya.
2. Misi pembangunan jangka menengah Kota Baubau Tahun 2018-2023 yakni :
  - a. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Tertib;
  - b. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Aman;
  - c. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Maju;
  - d. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Populer;
  - e. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Indah;
  - f. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Lancar.
3. Dalam konteks Perencanaan Pembangunan Daerah, urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diletakkan pada **misi ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Tertib”**. Dalam konteks ini, Kota Baubau dipandang sebagai sebuah wilayah yang Tertib dalam pengelolaan pemerintahan dan administrasi. tertib pengelolaan keuangan, tertib pelayanan publik, tertib tata pergaulanan sosial kemasyarakatan dan tertib penegakkan hukum. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur,



namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kota Baubau juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur. Hal ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Tujuan RPJM Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah meliputi :
  - a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
  - b. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang religius;
  - c. Meningkatkan pemerataan kualitas SDM;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
  - e. Meningkatkan daya saing daerah;
  - f. Mewujudkan Kota Baubau sebagai kota dagang, jasa dan transit yang berbudaya;
  - g. Meningkatkan pengelolaan kota yang rapi, indah dan ramah lingkungan;
  - h. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah.





## 2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN

### 2.1.1.1. Tujuan

Merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai 5 tahun ke depan. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2018–2023 adalah **“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan.”**

### 2.1.1.2. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut (2018–2023) adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan OPD.
2. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang).

**Tabel 2.1.1.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	Persen	60	67	70	75	80
			Persentase sinergitas capaian perencanaan	Persen	80	85	90	95	100
			Persentase konsistensi perencanaan	Persen	85	87	92	96	100
2		Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Presentase Rata-Rata hasil ketercapaian pelaksanaan program Pendukung OPD pendukung OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.1.1.2.2**  
**Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET AKHIR (2023)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD.	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	%	N/A	80
		Persentase sinergitas capaian perencanaan	%	N/A	100
		Persentase konsistensi perencanaan	%	N/A	100
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	%	N/A	100

### 2.1.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 2.1.1.3.1.Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi yang sudah dirumuskan Bappeda Kota Baubau yaitu ***“Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui integrasi sistem informasi dalam Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan”***.

### 2.1.1.3.2. Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Melaksanakan pendataan perencanaan pembangunan daerah.
2. Memperkuat sistem informasi data terpadu.
3. Meningkatkan validitas data sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang pemerintahan, sumber daya manusia dan kebudayaan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana.
6. Meningkatkan system koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah.
7. Meningkatkan pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD.

**Tabel 2.1.1.3.2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau**

<b>Visi RPJMD</b>	<b>MEWUJUDKAN BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA 2018-2023</b>			
<b>Misi RPJMD</b>	<b>Mewujudkan Baubau sebagai Kota Tertib</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	1. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC. 2. Persentase sinergitas capaian	Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui intergrasi	Melaksanakan pendataan perencanaan pembangunan daerah Memperkuat sistem informasi data terpadu



n.		perencanaan. 3. Persentase konsistensi perencanaan	sistem informasi dalam Singkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan	<p>Meningkatkan validitas data sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan</p> <p>Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang pemerintahan, sumber daya manusia dan kebudayaan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan</p> <p>Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan.</p>
	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD		Meningkatkan pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD

Cara mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah melalui perumusan strategi yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1.1.3.2.2**  
**Strategi, Program dan Kegiatan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau tahun 2022**

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui intergrasi sistem informasi dalam Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
				Pelaksanaan Konsultasi Publik
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah



				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2	Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui integrasi sistem informasi dalam Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan



				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan



			Daya Alam)	Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen





				Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang



				Kewilayahan
3	Mendorong Peningkatan Pencapaian capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2022, target yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	1. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC.	%	75
		2. Persentase sinergitas capaian Perencanaan.	%	95
		3. Persentase konsistensi perencanaan	%	96
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	%	100

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2022 :

**Tabel 2.3.1**  
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Kota Baubau**  
**Tahun Anggaran 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	76
		Persentase sinergitas capaian perencanaan	95
		Persentase konsistensi perencanaan	96
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100

**Tabel 2.3.2**  
**Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja BAPPEDA**

## Kota Baubau Tahun Anggaran 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
A	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.169.239.980	1.745.058.580	APBD
B	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.506.908.560	1.923.096.310	APBD
C	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.558.798.796	6.510.184.910	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>8.234.947.336</b>	<b>10.178.339.800</b>	<b>APBD</b>

## 2.4. Program dan Kegiatan

### 2.4.1. Program

Program Kerja Teknis Operasional merupakan alat untuk mencapai tujuan dan mewujudkan tujuan Bappeda Kota Baubau meliputi:

- Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Program Teknis).
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (Program Teknis).
- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Program penunjang).

### 2.4.2. Kegiatan

Untuk Kegiatan dan Target Kinerja Bappeda Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 Perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4.2.1**



**Perbandingan Kegiatan dan Target Kinerja  
Bappeda Kota Baubau Tahun 2022 Induk dan Perubahan**

No	Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.169.239.980</b>	<b>1.745.058.580</b>
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	506.482.220	952.686.560
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	358.570.120	370.833.180
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	304.187.640	421.538.840
<b>II.</b>	<b>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>97%</b>	<b>1.506.908.560</b>	<b>1.923.096.310</b>
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	895.572.400	1.059.890.250
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	400.842.680	643.042.580
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	210.493.480	220.163.480
<b>III.</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>5.558.798.796</b>	<b>6.510.184.910</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	100%	59.983.430	59.983.430
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.057.771.436	4.292.669.000



3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	10.107.200	10.107.200
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	17.640.000	39.052.000
5	Administrasi umum perangkat daerah	100%	712.716.230	1.012.771.580
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	161.640.000	642.956.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	195.899.500	265.407.500
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	343.041.000	187.238.200
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>	<b>8.234.947.336</b>	<b>10.178.339.800</b>

**Tabel 2.4.2.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Target Kinerja**  
**Bappeda Kota Baubau Tahun 2022 Perubahan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100 %</b>	<b>1.745.058.580</b>
<b>A</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>100%</b>	<b>952.686.560</b>
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Kegiatan	33.388.400
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	4 Laporan	213.473.600
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Dokumen	36.287.620
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	41 SKPD	34.785.700
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	200 usula	155.458.600
6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dok	479.292.640





		Kabupaten/Kota		
	<b>B</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>370.833.180</b>
	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dok	133.976.360
	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	2 Dok	187.507.900
	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan 2 Dok 1 Maket	49.348.920
	<b>C</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>421.538.840</b>
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Dok	253.794.440
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Dok	167.744.400
<b>II</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>97%</b>	<b>1.923.096.310</b>
	<b>A</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>1.059.890.250</b>
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 OPD	46.657.600
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 OPD	53.464.400
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 OPD	32.046.800
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 kegiatan 1 dokumen	31.916.100
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 OPD	50.379.540
	6	Asistensi Penyusunan Dokumen	9 OPD	66.120.460



		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 OPD	13.873.400
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen 5 Kegiatan	765.431.950
	<b>B</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>100%</b>	<b>643.042.580</b>
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	25.759.100
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	27.201.700
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	86.776.700
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	100.953.900
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 laporan	8.636.000
	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	24.869.140
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	43.346.040
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	325.500.000
	<b>C</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>220.163.480</b>
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 laporan	23.450.000



	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	25.000.000
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	16.214.200
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	150.500.000
	5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	4.999.280
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT</b>		<b>100%</b>	<b>6.510.184.910</b>
	<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>59.983.430</b>
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10.611.990
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	9.548.970
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	8.632.390
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	10.502.940
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.623.970
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10.063.170
	<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.292.669.000</b>
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	4.129.100.050
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 orang	88.758.800
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokume	74.810.150
	<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.107.200</b>
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	10.107.200
	<b>D</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>39.052.000</b>



		<b>Perangkat Daerah</b>		
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120 lembar/stell	17.640.000
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	21.412.000
	<b>E</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.012.771.580</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26 jenis	17.210.000
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66 jenis	54.242.580
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis	31.520.000
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	12.800.000
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42 kali	74.976.000
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 kali	822.023.000
	<b>F</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>642.956.000</b>
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		481.316.000
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	161.640.000
	<b>G</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>265.407.500</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 paket/surat	6.039.500
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening	211.368.000
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 buah	15.000.000
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Orang/Bulan	33.000.000
	<b>H</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>187.238.200</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	64.912.200
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit	22.250.000



	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantoran dan Bangunan Lainnya	2 unit	100.076.000
<b>JUMLAH</b>				<b>10.178.339.800</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai



keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Format Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kota Baubau 2022, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indicator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Baubau 2022.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra SKPD.

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2022 dengan menggunakan beberapa indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC
- b. Persentase sinergitas capaian perencanaan
- c. Persentase konsistensi perencanaan
- d. Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD

Dari indikator kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa Metodologi pengukuran capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota baubau sebagai berikut :

1. Untuk menghitung Presentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC yaitu berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Penetapan Nilai sakiip**  
**berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021**

<b>N O</b>	<b>PREDIKAT</b>	<b>NILAI ABSOLUT</b>	<b>INTERPRESTASI</b>
1	AA	> 90 - 100	<i>Sangat Memuaskan yaitu :</i> Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	<i>Memuaskan yaitu :</i> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	<i>Sangat Baik yaitu :</i> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	> 60 - 70	<i>Baik yaitu :</i> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.

			Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	<i>Cukup (Memadai) yaitu :</i> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	c	> 30 - 50	<i>Kurang yaitu :</i> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 - 30	<i>Sangat Kurang Yaitu :</i> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

2. Untuk menghitung Persentase sinergitas capaian perencanaan, Persentase konsistensi perencanaan, dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD yaitu dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, presentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

<b>% Capaian</b>	<b>=</b>	<b>Realisasi</b>	<b>X 100 %</b>
		<b>Target</b>	

- b. jika realisasi tinggi menunjukkan pencapaian kinerja yang tidak baik atau rendah, presentase capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus :

<b>Persentase Pencapaian Target</b>	<b>=</b>	<b>(2 x Target)-Realisasi</b>	<b>X 100 %</b>
		<b>Target</b>	



Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	$\leq 50$	Sangat Renda	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Adapun Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah**  
**Kota Baubau Tahun 2022**

N o	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian tahun 2022	PREDIK AT
1	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	75 %	87,10%	116,13%	Sangat Baik
		Persentase sinergitas capaian perencanaan	95 %	86,87 %	91,58 %	Sangat Baik
		Persentase konsistensi perencanaan	96 %	100 %	100 %	Sangat Baik
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100%	100%	100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau tahun 2022 terdapat capaian kinerja yang **realisasinya di atas 100%** yaitu pada indikator Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC, pencapaian target kinerja ini diperoleh karena adanya komitmen antara atasan dan bawahan pada Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau untuk melaksanakan perjanjian kinerja



yang telah dibuat dan disepakati di awal tahun 2022 sebelumnya, selain itu juga Tersedianya regulasi sebagai pijakan pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini kegiatan dari proses perencanaan sampai pelaporan. Secara rinci meliputi :

1. Tersedianya indikator kinerja utama renstra.
2. Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)
3. Tersedianya pedoman penyusunan renstra unit kerja, penyusunan perjanjian kinerja, pedoman penilaian kinerja, dan pedoman penyusunan pelaporan Kinerja (SAKIP) Terlaksananya sosialisasi penyesuaian indikator kinerja utama renstra
4. Terlaksananya sosialisasi regulasi dan pedoman perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
5. Tersedianya pedoman sistem perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan Terintegrasi.

Selain pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) diatas, juga ada pengukuran kinerja berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan di masing-masing bidang yaitu dapat dilihat sebagai berikut :



**Tabel 3.2.2**  
**Target dan Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BAUBAU	Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	100%			
			Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021;	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	100%			



			Peraturan Daerah Kota Baubau No. 1 Tahun 2021, tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Baubau Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
			Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau;	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 60 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			



				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 9 orang menjadi 12 Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Dokumen menjadi 12 Dokumen
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 40 Lembar, 40 Stel dan 40 Stel menjadi 3 Paket
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			



				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26 Paket	26 Paket			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 26 Jenis menjadi 26 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66 Paket	66 Paket			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 66 Jenis menjadi 66 Paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 4 Jenis menjadi 4 Paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	4 Dokumen	4 Dokumen			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 4 Jenis menjadi 4 Dokumen
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 42 Kali menjadi 12 Laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 35 Kali menjadi 12 Laporan
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			



				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	18 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
				<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 2 Kegiatan menjadi 2 Dokumen
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 4 Laporan menjadi 4 Dokumen





				Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Dokumen menjadi 1 Berita Acara
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	41 Berita Acara	41 Berita Acara			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 41 SKPD menjadi 41 Berita Acara
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	200 Berita Acara	200 Berita Acara			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 200 Usulan menjadi 200 Berita Acara
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	40 usulan	40 usulan			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 40 Kegiatan menjadi 40 Usulan
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Masukan	5 Masukan			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 5 Dokumen menjadi 5 Masukan
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	80 Orang	80 Orang			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 2 Dokumen menjadi 80 Orang
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	1 Buku	1 Buku			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg



				Kabupaten/Kota					semula 1 kegiatan, 2 dok, 1 maket Dokumen menjadi 1 Buku
				<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 2 Dokumen menjadi 2 Laporan
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 2 Dokumen menjadi 2 Laporan
				<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 20 OPD menjadi 3 Dokumen
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah			



				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Laporan	20 Laporan			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 20 OPD menjadi 20 Laporan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 3 Kegiatan, 1 Dokumen menjadi 4 Laporan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	9 Dokumen			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 9 OPD menjadi 9 Dokumen
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 OPD	9 OPD			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 OPD	9 OPD			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Dokumen, menjadi 1 Laporan
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			



				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Laporan menjadi 1 Dokumen
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Laporan menjadi 1 Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Laporan menjadi 1 Perangkat Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Dokumen			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Laporan menjadi 1 Dokumen
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Laporan menjadi 1 Dokumen
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Laporan menjadi 1 Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Laporan menjadi 1 Perangkat Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Dokumen menjadi 1 Laporan



				Bidang SDA				
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	1 Dokumen	1 Dokumen		Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Laporan menjadi 1 Dokumen
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 OPD	1 OPD		Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Laporan menjadi 1 OPD
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 OPD	1 OPD		Penyesuaian ke Ketmen 050-5889 yg semula 1 Laporan menjadi 1 OPD
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan		

### 3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan OPD

**Tabel 3.3.1**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan persasaran strategis**

No.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	Hasil penilaian SAKIP Inspektorat Kota Baubau terhadap OPD dengan nilai CC dibagi jumlah keseluruhan OPD dikali 100%;
		Persentase sinergitas capaian perencanaan Persentase konsistensi perencanaan	Jumlah sasaran RPJMD yang mencapai target dibagi seluruh sasaran dikali 100%;
		Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	Jumlah program RKPD yang terakomodir dalam DPA dengan jumlah keseluruhan program dalam RPJMD pada tahun n dikali 100%

2. Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran renstra OPD.

**Tabel 3.3.2**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi**  
**Perhitungan Program Pendukung Sasaran OPD**



No.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran renstra OPD	persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	Realisasi/Target X 100%

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2022 :

**Tabel 3.3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023) %	Capaian s/d 2022 terhadap target 2023 %
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	75 %	87,10%	116,13%	80%	116,13%
		Persentase sinergitas capaian perencanaan	95 %	86,87 %	91,58 %	100 %	95 %
		Persentase konsistensi perencanaan	96 %	100 %	100 %	100 %	96 %
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100%	100%	100%	100 %	100 %

Sedangkan perbandingan tingkat capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau dari Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021 dan sampai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021. Dan Tahun 2022, Badan Perencanaan Daerah Kota Baubau**

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1.	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	100%	100%	100%	116,13%
2.	Persentase sinergitas capaian perencanaan	100%	100 %	88,9%	91,58 %
3.	Persentase konsistensi perencanaan	105%	105 %	109%	100%
4.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	84%	95 %	100%	100%

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Tahun 2022 serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.3.5**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2022**  
**serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	75%	87,10 %	116,13 % (tetap disebut 100%)	<p>pencapaian target kinerja ini diperoleh karena adanya komitmen antara atasan dan bawahan pada Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau untuk melaksanakan perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati, selain itu juga Tersedianya regulasi sebagai pijakan pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini kegiatan dari proses perencanaan sampai pelaporan. Secara rinci meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen terhadap indikator kinerja utama renstra</li> <li>2. Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)</li> <li>3. Tersedianya pedoman penyusunan renstra unit kerja, penyusunan perjanjian kinerja, pedoman penilaian kinerja, dan pedoman penyusunan pelaporan Kinerja (SAKIP) Terlaksananya sosialisasi penyesuaian indikator kinerja utama renstra</li> <li>4. Terlaksananya sosialisasi regulasi dan pedoman perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan</li> <li>5. Tersedianya pedoman sistem perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan Terintegrasi.</li> </ol>	target capaian sasaran RPJMD banyak yang tidak mencapai target.	Perlu meningkatkan upaya pendampingan pada OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
			Persentase sinergitas capaian perencanaan	95%	86,87 %	91,58 %			
			Persentase konsistensi perencanaan	96%	100 %	100 %			
		Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100%	100 %	100 %			
Rata-rata Capaian per indikator kinerja						97,89%			

**Tabel 3.3.6**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2022**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau**

Sasaran Strategis Daerah	Indikator Kinerja Utama Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	75 %	87,10 %	116,13% (disebut 100)	3.668.154.890	3.474.509.943	94,72 %	9,70
			Persentase sinergitas capaian perencanaan	95 %	86,87 %	91,58 %				
			Persentase konsistensi perencanaan	96 %	100%	100 %				
		Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100 %	100 %	100%	6.510.184.910	5.590.788.097	85,88 %	
<b>Tingkat Capaian</b>						<b>97,89 %</b>	<b>10.178.339.800</b>	<b>9.065.298.040</b>	<b>89,06</b>	
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian</b>									<b>90,30 %</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan ditunjukkan pada persentase capaian kinerja sebesar 97,89 % dengan pemanfaatan anggaran terkait program strategis sebesar 89,06 % dari yang telah ditetapkan, dan tingkat Efisiensi sebesar 9,70 %



### 3.4 Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran per sasaran strategis, per program, dan Realisasi Anggaran Pencapaian IKU & Program Penunjang pada Bada Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2022 dapat dilihat pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Alokasi Per Sasaran Strategis dan per indikator Kinerja Tahun 2022**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota baubau**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Anggaran 2022	Realisasi 2022	% (Capaian)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	3.668.154.890	3.474.509.943	94,72 %
		Persentase sinergitas capaian perencanaan			
		Persentase konsistensi perencanaan			
2	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD.	persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	6.510.184.910	5.590.788.097	85,88 %

Dari tabel di atas, sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya kualitas Perencanaan OPD yang merupakan Iku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau memperoleh target anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dari sasaran Strategis yang kedua yaitu Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD. Target anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan OPD yaitu sebesar Rp. 3.668.154.890 sedangkan pada sasaran strategis Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran



RENSTRA OPD yaitu sebesar Rp. 6.510.184.910. hal ini di karenakan pada sasaran strategis Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD terdapat Belanja begawai sebesar Rp. 4.215.350.050.

**Tabel 3.4.2**  
**Alokasi Per Program Tahun 2022**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau**

No	Program	Anggaran	Realisasi	% (capaian)
1	2	3	4	5
1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.745.058.580	1.716.355.922	98,36
2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.923.096.310	1.758.154.021	91,42
3	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.510.184.910	5.590.788.097	85,88



**Tabel 3.4.3**  
**Realisasi Anggaran Pencapaian IKU & Program Penunjang Tahun 2022**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau**

No	Sasaran Strategis OPD	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	A <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1.745.058.580	1.716.355.922	98,36	APBD	Indikator Kinerja Utama
		1 <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	952.686.560	940.113.150	98,68	APBD	IKU
		1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	33.388.400	32.946.000	98,67	APBD	IKU
		2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	213.473.600	211.149.861	98,91	APBD	IKU
		3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	36.287.620	36.063.500	99,38	APBD	IKU
		4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	34.785.700	34.740.000	99,87	APBD	IKU
		5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	155.458.600	151.063.059	97,17	APBD	IKU



	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	479.292.640	474.150.730	98,93	APBD	IKU
	<b>II</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>370.833.180</b>	<b>359.410.500</b>	<b>96,92</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	133.976.360	123.921.500	92,50	APBD	IKU
	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	187.507.900	186.332.000	99,37	APBD	IKU
	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	49.348.920	49.157.000	99,61	APBD	IKU
	<b>III</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>421.538.840</b>	<b>416.832.272</b>	<b>98,88</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	253.794.440	251.121.772	98,95	APBD	IKU
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	167.744.400	165.710.500	98,79	APBD	IKU
	<b>B</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN</b>	<b>1.923.096.310</b>	<b>1.758.154.021</b>	<b>91,42</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>



		<b>SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
		<b>1</b> <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.059.890.250</b>	<b>912.325.671</b>	<b>86,08</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
		1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.657.600	29.892.000	64,07	APBD	IKU
		2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	53.464.400	22.090.000	41,32	APBD	IKU
		3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32.046.800	7.363.000	22,98	APBD	IKU
		4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	31.916.100	20.465.000	64,12	APBD	IKU
		5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.379.540	34.692.000	68,86	APBD	IKU



	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	66.120.460	57.890.500	87,55	APBD	IKU
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13.873.400	13.476.000	97,14	APBD	IKU
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	765.431.950	726.457.171	94,91	APBD	IKU
	<b>II</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>643.042.580</b>	<b>629.334.350</b>	<b>97,87</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.759.100	24.487.500	95,06	APBD	IKU
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	27.201.700	26.892.000	98,86	APBD	IKU
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	86.776.700	84.213.750	97,05	APBD	IKU





LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					
		4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100.953.900	94.089.850	93,20	APBD	IKU
		5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.636.000	8.121.250	94,04	APBD	IKU
		6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24.869.140	24.122.750	97,00	APBD	IKU
		7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	43.346.040	42.407.250	97,83	APBD	IKU
		8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	325.500.000	325.000.000	99,85	APBD	IKU
		<b>III</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>220.163.480</b>	<b>216.494.000</b>	<b>98,33</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	23.450.000	22.685.500	96,74	APBD	IKU



			Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000	24.371.000	97,48	APBD	IKU
		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	16.214.200	15.334.000	94,57	APBD	IKU
		4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	150.500.000	149.223.000	99,15	APBD	IKU
		5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	4.999.280	4.880.500	97,62	APBD	IKU
2	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD.		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
		1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>59.983.430</b>	<b>59.519.000</b>	<b>99,23</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	10.611.990	10.469.500	98,66	APBD	NON IKU



			Daerah					
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.548.970	9.535.500	99,86	APBD	NON IKU
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	8.632.390	8.488.750	98,34	APBD	NON IKU
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.502.940	10.452.500	99,52	APBD	NON IKU
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.623.970	10.540.500	99,21	APBD	NON IKU
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.063.170	10.032.250	99,69	APBD	NON IKU
		<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.292.669.000</b>	<b>3.488.324.409</b>	<b>81,26</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.129.100.050	3.329.156.409	80,63	APBD	NON IKU
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.758.800	85.305.000	96,11	APBD	NON IKU
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	74.810.150	73.863.000	98,73	APBD	NON IKU
		<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.107.200</b>	<b>9.192.000</b>	<b>90,95</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.107.200	9.192.000	90,95	APBD	NON IKU
		<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>39.052.000</b>	<b>33.616.000</b>	<b>86,08</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.640.000	17.640.000	100,00	APBD	NON IKU



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.412.000	15.976.000	74,61	APBD	NON IKU
	<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.012.771.580</b>	<b>996.609.747</b>	<b>98,40</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.210.000	16.671.000	96,87	APBD	NON IKU
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.242.580	51.435.000	94,82	APBD	NON IKU
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.520.000	31.273.750	99,22	APBD	NON IKU
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.800.000	11.805.000	92,23	APBD	NON IKU
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.976.000	64.644.000	86,22	APBD	NON IKU
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	822.023.000	820.780.997	99,85	APBD	NON IKU
	<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>642.956.000</b>	<b>595.226.000</b>	<b>92,58</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	481.316.000	438.100.000	91,02	APBD	NON IKU
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.640.000	157.126.000	97,21	APBD	NON IKU
	<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>265.407.500</b>	<b>234.570.141</b>	<b>88,38</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.039.500	5.975.000	98,93	APBD	NON IKU
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.368.000	182.595.141	86,39	APBD	NON IKU
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	APBD	NON IKU
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.000.000	31.000.000	93,94	APBD	NON IKU



		<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>187.238.200</b>	<b>173.730.800</b>	<b>92,79</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.912.200	53.149.800	81,88	APBD	NON IKU
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.250.000	21.140.000	95,01	APBD	NON IKU
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.076.000	99.441.000	99,37	APBD	NON IKU

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Baubau Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2022.

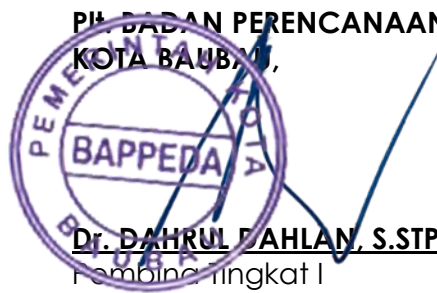
Pengukuran kinerja Bappeda Kota Baubau Tahun 2022, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan **kualitas capaian keluaran (output)** atau **hasil (outcome)** dari kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022, Capaian rata-rata kinerja sasaran Bappeda Kota Baubau Tahun 2022 berdasarkan indikator/ parameter yang ditetapkan telah terealisasi.

Secara umum capaian kinerja di tahun 2022 pada Bappeda Kota Baubau telah mencapai peringkat yang dapat dikategorikan Sangat Baik, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian sebesar 97,89 % terhadap target yang ditetapkan. Hal tersebut sangat ditunjang dengan komitmen pimpinan, serta upaya yang maksimal dari seluruh komponen di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau dan tidak terlepas dari komitmen seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Baubau untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dan tindak lanjut terhadap perencanaan serta upaya untuk lebih meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf dan masyarakat luas yang membutuhkannya. LAKIP ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau.

Baubau, Februari 2023

**PIH BAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BAUBAU,**



**Dr. DAHRUL DAHLAN, S.STP., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780717 199612 1 002